

2010-06-025

Indonesia Perlu Menerapkan "OIL DIPLOMACY"

Dirgo D.Purbo

PENDAHULUAN

"We believe no more in Bonaparte's fighting merely for the liberties of the seas than in Great Britain's fighting for the liberties of mankind. The object is the same, to draw to themselves the power, the wealth and the resources of other nations."

Thomas Jefferson
President of the United States
of America, 1801 - 1809

"We must become the owners, or at any rate the controllers at the source, of at least a proportion of the oil which we require." -

British Royal Commission,
in 1913, on Churchill's Iraq policy

In the early of 20 th century, the imperialistic rulers ; the British and American ruling cabal decided that the energy of choice for the world would be oil and natural gas (not coal). To overcome the problem of lacking oil in the future, oil holdings being broken apart by the U.S. government in 1911, hence, John Rockefeller set out to control the world's energy reserves. World War I was the strategy of the world oil cartel (Standard, Shell, British Petroleum) to take over the colonies of France, Holland, Spain and Portugal. The engines of war now ran on petroleum-based products, so ownership of oil could determine who won or lost a war—therefore who would rule the world. Oil, instead of gold, became the token of power. By 1919, the Oil Empire, not based on countries or

nations, but on private corporations, ruled the world.

Norman D. Livergood,

The New Enlightenment. October, 2001

"It will be necessary to station US troops in occupied Iraq for the foreseeable future, the US is serving notice to Iran and to Saudi Arabia (both of which were once secure bases for US troops but are so no longer) that the US will reassert its presence as the dominant military power in the region to ensure the flow of oil."

Colin Powell,

Secretary of State, 2003

The United States already controls the sea routes from the oil-rich Persian Gulf through the Malacca Strait. To prevent any disruption, China has adopted a "string of pearls" strategy that calls for both offensive and defensive measures stretching along the oil-shipment sea lanes from China's coast to the Middle East.

Hu Jintao,

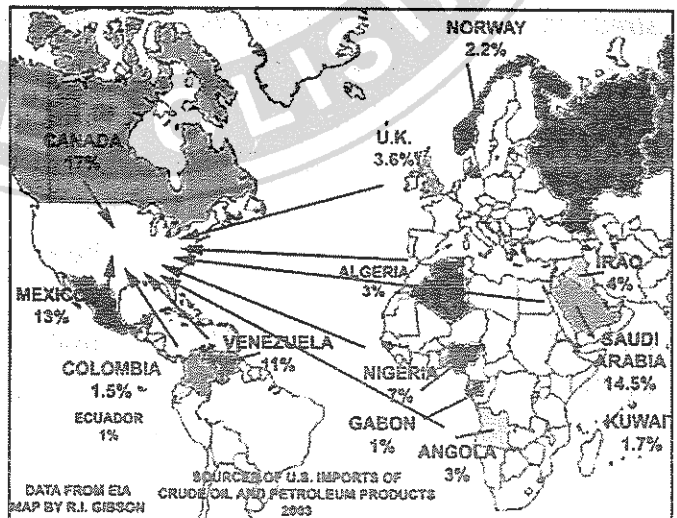
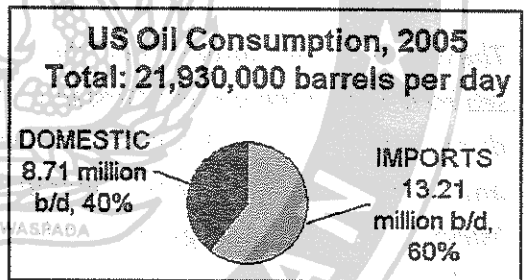
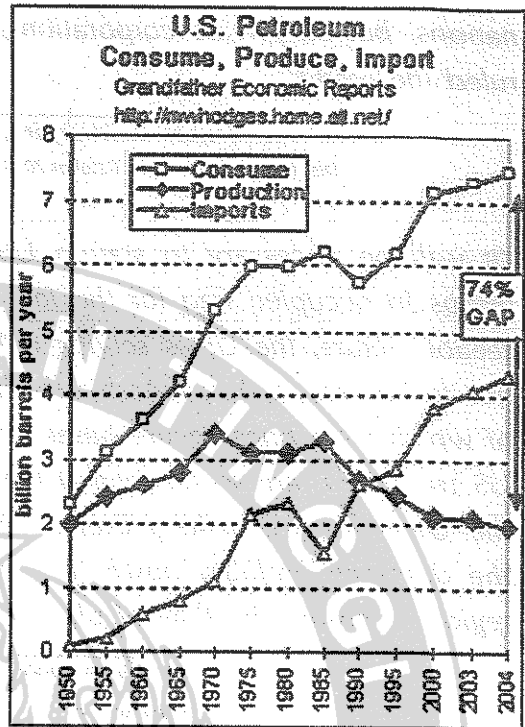
Chinese President, 2004

CENTER GRAVITY OF WORLD ECONOMY

Mengikuti pernyataan pernyataan dia-

tas ,tampak jelas bahwa minyak sudah merupakan ajang perebutan sepanjang sejarah manusia sampai detik ini. Adanya sumber minyak di suatu negara manapun tentu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama merupakan awal suatu konflik bila minyak ditemukan di suatu negara berkembang yang tidak stabil sistem politiknya, karena adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil antara pemerintah pusat dan penduduk lokal. Berdasarkan observasi beberapa tahun, kompetisi untuk alokasi ekspor minyak telah menimbulkan suatu pameo para *oiltraders* dari negara-negara Asia Timur yang bermarkas di Arab Saudi dengan mengatakan bahwa: *"Setiap satu barel minyak yang dialokasikan untuk konsumsi suatu Negara sama artinya dengan berkurangnya satu barel minyak bagi Negara lain. Siapapun Negara yang mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi satu barel itu, akan menimbulkan kekurangan konsumsi satu barel bagi Negara lain "*. Atas dasar pemahaman inilah yang berkaitan langsung dengan teori dasar hukum ekonomi *supply and demand*, maka harga minyak dipasar dunia terkondisi dan terstruktur. Saat ini permintaan minyak yang begitu agresif datang dari Cina dan India. Kedua ne-

gara menargetkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi diatas 7 % , maka otomatis pada saat yang bersamaan akan membutuhkan volume energi (baca :minyak mentah) *relative* besar. Ekonomi dunia dijalankan dengan minyak, oleh karena itu untuk mempertahankan pertumbuhannya, berarti negara-negara diatas juga memerlukan jaminan suplai energi yang berkesinambungan. Cina memerlukan impor minyak sekitar 2,5 juta barel per hari(bph) dan India 1,5 juta bph. Sedangkan bagi Jepang setiap hari diperlukan sekitar 5,7 juta barel. Amerika yang merupakan konsumen minyak terbesar di dunia (22 juta bph), memerlukan impor sebesar 13 juta bph. Sedangkan sumber minyak terbesar didunia berada di kawasan *Heartland*, dimana para industrialis menyebutnya sebagai *Center Gravity of World Economy*, yaitu: Timur Tengah dan Asia Tengah, khususnya Arab Saudi yang berkemampuan produksi minimal 9,5 juta bph dan Rusia 8,5 juta bph serta beberapa negara signifikan produsen minyak seperti Iran, Kuwait, Aljazair, Qatar, UAE dll. Berikut dibawah ini data konsumsi dan jalur distribusi suplai minyak ke Amerika Serikat.



Cadangan Minyak Terbukti dikawasan " *Center Gravity of World Economy* " (OPEC) :

NEGARA	PROVEN RESERVED	PRODUCTIO N CAPACITY
	(,000)/Barel	(,000)Bph
Saudi Arabia	261,750,000	9,500
Iran	115,700,000	3,900
Iraq	112,500,000	3,000
United Arab Emirates	97,800,000	2,500
Kuwait	96,500,000	2,400

Biaya produksi untuk mengangkat minyak di Arab Saudi dan sekitarnya hanya US\$ 2 per barel,bandingkan dengan di Amerika US \$10-11 per barel; Russia US \$14; Venezuela US \$7; North Sea US\$11; Mexico US \$10. per barel,Indonesia berkisar US\$ 8 –US \$10. Kalau dihitung secara kasar Arab Saudi dengan harga minyak US \$ 60 per barel,artinya ada margin sebesar US \$ 58 per barel dan bila dikalikan dengan produksinya 9,5 juta bph sesuai dengan data diatas , dapat memperoleh devisa sebesar US \$ 551 juta per hari. Iran US \$226,2 juta per hari,Kuwait US\$ 139,2 juta per hari dst. Tidakkah mengherankan kalau kawasan ini dijuluki *Center Gravity of World Economy* dan menjadi ajang perebutan pengaruh bagi negara-negara konsumen,. Sedangkan Rusia dimasa mendatang , yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari kawasan

Heartland , mempunyai posisi sentral untuk suplai minyak dan gas ke Eropa Timur,Barat,dan Asia Timur. Meskipun demikian, bila dilihat dari sudut

geostrategis, Rusia tidak akan mampu menyaingi Arab Saudi. Evgueni Khokhlov,Ph.D. yang melakukan penelitian mengenai kemampuan produksi minyak di Rusia berpendapat

bahwa : *Oil is a sizable part of Russia's exports. Financial stability in Russia is heavily influenced by the prices of oil worldwide. "Exporting of Russian crude oil and oil products provides more than 25 percent of revenue for the Russian government. The oil boom started in 1999 and drastically increased after the September 11th attacks on the U.S. Not only the U.S. but also Europe, China, and Japan became focused on Russia to reduce its oil dependence from the Middle Eastern countries.* Sedangkan data yang dikeluarkan oleh *Economist Intelligence Unit 2004*, menjelaskan bahwa Rusia yang mempunyai kapasitas produksi nasional sekitar 8,5 juta bph,dalam tiga tahun terakhir ini telah memperoleh *windfallprofit* US\$100 miliar setiap tahun.

CIA MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN PRESIDEN AS ?

Pemerintah Amerika Serikat meyakini bahwa suatu keabsahan untuk melindungi perusahaan-perusahaan minyaknya yang beroperasi di semua penjuru dunia dimana hal tersebut merupakan representasi kepentingan nasionalnya. Seluruh kegiatan perusahaan minyak Amerika itu secara otomatis juga punya arti bagi kepentingan tentaranya. Bagi Amerika, perang merupakan mekanisme untuk mengontrol kepentingan strategisnya, yang tidak lain adalah untuk melindungi komoditi minyak. Para pemikir strategis militer Amerika berpendapat bahwa sejak tahun 1973 sampai sekarang selalu mempunyai prinsip yang sangat mendasar yaitu : Bagaimana mungkin kendaraan-kendaraan lapis baja, pesawat-pesawat terbang, armada kapal laut berteknologi canggih bisa bergerak, tanpa dukungan jaminan suplai minyak yang dapat diandalkan? Jawaban kunci atas pertanyaan ini ialah pengontrolan arus minyak dari sumbernya dan inilah merupakan panggilan kepentingan nasional Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, CIA dalam operasi intelijen strategisnya selalu menempatkan aspek minyak pada skala prioritas kebijakan

National Security Amerika. Menurut seorang independen wartawan Joe Vialis bahwa sejak puluhan tahun, Badan Intelijen Amerika, CIA selalu berupaya untuk mendominasi kegiatannya secara global, dan cenderung untuk lebih menopang kebijakan Presiden Amerika Serikat, yang berkaitan dengan aspek minyak. Hal ini terbukti ketika Presiden George W Bush mengambil keputusan untuk menyerang Irak setelah mendapat laporan intelijen yang direkayasa oleh CIA tentang adanya Senjata Pemusnah Massal (WMD – Weapon of Mass Destruction). Ternyata setelah hampir 3 tahun penyerbuan AS ke Irak, rakyat Irak yang tewas sudah melebihi 100 ribu jiwa. Sedangkan tentara Amerika dan sekutunya yang tewas lebih dari 2200 jiwa, namun sampai sekarang WMD belum diketemukan, NOL (O) BESAR, alias NIHIL. Dan hal itu telah diakui oleh George W. Bush bahwa memang, WMD tidak ada. Begitu juga PM Inggris Tony Blair menyatakan pengakuan yang sama. Bila merujuk pada pandangan Norman D. Livergood seperti yang diurai pada awal tulisan ini, kawasan *Heartland* sudah merupakan sasaran dari *grand strategy* AS. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya atas tindakan unilateralisme tersebut ? Apakah ini merupakan refleksi

dari nilai-nilai demokrasi serta apresiasi HAM ala Amerika dan Inggris yang selalu disanjung oleh banyak pengamat politik dan sementara tokoh-tokoh nasional kita? Di lain pihak Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain yang setara, sejajar dan selalu saling menghargai kedaulatan masing-masing. Tetapi ketika kepentingan nasional Amerika terusik di kawasan Timur Tengah atau ladang minyak di belahan bumi lain, maka seluruh elemen dari struktur organisasi organik pemerintahannya akan langsung menanggapi sesuai kehendak nilai-nilai Amerika. *Who is involved and what are the links between oil and US politics? The answer : The President of the United States, the Vice-President, the Defence Secretary and his Deputy, the Attorney General, The Chairman of the National Security Council, the CIA Chief and even the special envoy to Afghanistan - all had links with oil. Never in history has a government been so clearly identified with one industry.* Nada-nada peringatan selalu dilontarkan dalam berbagai forum resmi seperti pernyataan oleh Madeleine Albright, sewaktu menjabat *Secretary of States* yaitu : "If

we have to use force, its because we are Americans. We are the indispensable nation. When we can change things we shoul do so, and the rest of the world should follow".

PERKEMBANGAN GEOPOLITIK DI KAWASAN HEARTLAND

Geopolitics is not only about war and peace. It is about controlling the world resources, particularly 'black gold'. Several international conflicts in recent times have been sparked by the need to control oil fields. The world's dependence on oil is complete.

Adanya perkembangan geopolitik, terutama di kawasan *Heartland* atau di negara-negara major produsen seperti Nigeria dan Venezuela tentu akan memberikan implikasi langsung terhadap harga minyak dunia. Ada juga faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan harga minyak dunia yakni peran *Strategic Petroleum Reserve (SPR)* yang ditargetkan mengakumulasikan cadangan minyak mencapai 700 juta barel, lokasi di Louisiana dan Texas, Amerika Serikat. SPR dirancang untuk menghadapi situasi

emergency dan dapat mengalirkan minyak untuk kebutuhan dalam negeri AS hanya dalam tempo singkat dengan kemampuan sebesar 1 sampai 3 juta bph. Kalau ini dilakukan, maka akan mengurangi permintaan Amerika dipasaran minyak dunia seperti ketika bencana alam Katrina beberapa waktu lalu. Harga minyak langsung menurun setelah keran SPR dibuka. Dengan demikian keberadaan industri perminyakan dari tingkat hulu sampai hilir selalu mempunyai dimensi geopolitik, geoekonomi dan geostrategi.

Ada 4 (empat) kejadian yang sangat signifikan, tentang perkembangan geopolitik di kawasan *Heartland* baru baru ini, yakni (1).Rusia menghentikan suplai gas alam ke Ukraina yang otomatis mengakibatkan penyaluran ke beberapa negara di Eropa mengalami pengurangan dan menimbulkan kepanikan penduduknya ditengah musim dingin yang keras. Penghentian suplai itu dikarenakan Rusia menghendaki perubahan harga jual gas alam, dan sekaligus memantau atau mengukur seberapa strategisnya jalur suplai gas alam tersebut terhadap faktor *leverage bargaining position* atas kondisi geoekonomi terhadap negara-negara di benua Eropa. (2). Iran mengan-

ke beberapa negara yang mendukung Amerika Serikat untuk mengagendakan program nuklirnya di Dewan Keamanan PBB. Adanya tekanan oleh negara-negara Barat, membuat Iran mulai bereaksi dengan menarik dana hasil penjualan minyaknya yang ratusan miliar US \$, dan begitu juga dana yang disimpan dalam mata uang Euro ditarik ke kawasan Asia Tenggara, khususnya saat ini ke Malaysia dan Singapura. (3). Adanya karikatur Nabi Muhammad yang dimuat pada Koran-koran utama Denmark, Norwegia, Perancis, Spanyol, Belanda akan memicu sentimen anti komunitas masyarakat Eropa dari negara-negara penghasil minyak. Langkah pemboikotan barang-barang buatan negara-negara tersebut dikhawatirkan akan meluas dan diikuti dengan ancaman embargo suplai minyak, seperti kejadian tahun 1973. (4), Perjalanan kenegaraan Raja Arab Saudi, Abdullah ke Cina, India, Malaysia dan Pakistan. Kunjungan bersejarah ke Cina ini untuk menguatkan hubungan bilateral sejak pertemuan terakhir tahun 1990. Maksud dan tujuan utama pertemuan bilateral ini merupakan pemberian jaminan suplai energi. Kunjungan ke India pun merupakan sejarah tersendiri bagi kedua negara mengingat pertemuan bilateral terjadi pada 51 tahun

yang lampau. Agenda utama kunjungan Raja Arab Saudi ini tidak jauh berbeda dengan di Cina yaitu jaminan suplai energi. Dari kunjungan tersebut sudah tentu membuat Amerika dan para sekutunya berspekulasi akan adanya pengurangan jatah alokasi ekspor. Merambatnya harga minyak mendekati US\$70 per barel kiranya sudah dapat diprediksi. Ada suatu catatan tersendiri dari perjalanan keliling Raja Arab Saudi ini, yaitu timbulnya pertanyaan besar, mengapa Indonesia tidak termasuk dalam agenda untuk dikunjungi? Padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam serta jumlah pengiriman haji setiap tahun, terbesar di dunia. Selain itu Indonesia adalah sesama anggota OPEC dan anggota OKI. Ribuan TKI juga bekerja di Arab Saudi, dan Indonesia sebagai pengimpor minyak mentah. Dari keempat alasan agaknya masih ada pertimbangan khusus dari Raja Arab Saudi, yaitu bukan tak mungkin Arab Saudi mempunyai penilaian tersendiri terhadap perkembangan politik dalam negeri Indonesia terutama adanya pernyataan dari beberapa tokoh nasional kita tentang adanya sumbangan dana oleh oknum diplomat dari Timur Tengah yang diberikan kepada teroris di Indonesia.

INDONESIA BAGIAN DARI PEMICU HARGA MINYAK INTERNASIONAL

Kini posisi Indonesia dihadapkan pada situasi yang amat dilematis yaitu sebagai negara anggota OPEC, tapi juga menghadapi krisis energi ketika harga minyak mencapai US\$ 70 per barel yang lalu. Sebenarnya, krisis energi itu hanya dihadapi oleh negara pengimpor minyak seperti Amerika, Jepang, Cina, Perancis, Jerman, Korea Selatan dll. Tidak ada satupun negara anggota OPEC yang mengalami krisis energi, justru dengan harga minyak yang tinggi, mereka memanfaatkan momentum itu semaksimal mungkin untuk memperoleh devisa sebanyak banyaknya. Tidak ada satu pun negara anggota OPEC yang mematuhi kuota produksi. Indonesia merupakan satu satunya negara anggota OPEC yang tidak dapat menikmati *windfall profit* sewaktu tingginya harga minyak mentah di pasar dunia. Saat ini Indonesia sudah dalam posisi sama sama berkompetisi dengan negara-negara pengimpor minyak lainnya untuk mendapatkan alokasi ekspor atau mencari sumber minyak /BBM di beberapa negara produsen agar mendapatkan *security of supply*. Ini menandakan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang

sama dengan negara negara industri lainnya yang tergantung pada sumber minyak *foreign's oil*. Kebutuhan impor minyak Indonesia secara kombinasi, minyak mentah dan BBM pada tahun 2005 sebesar 800 ribu barel per hari. Jadi melihat kondisi ini, maka kebutuhan impor yang sangat besar kuantitasnya membuat *Indonesia sebagai bagian dari pemicu harga minyak Internasional*. Dengan permintaan dunia yang telah mencapai 85 juta barel per hari, Indonesia mewakili 1% dari permintaan tersebut. Indonesia yang tadinya sebagai *signifikan net oil exporter* kini telah menjadi *net oil importer*, dan kondisi ini akan menjadi permanen selamanya. Total konsumsi Indonesia sekitar 1,7 juta barel per hari. Kalau saja ada pihak yang menghendaki pembuktian kiranya perlu dibuat skenario agar Indonesia menyetop impor minyak secara kombinasi sebesar 800 ribu barel per hari. Pemberhentian impor minyak, tentu secara langsung akan mengakibatkan penurunan permintaan dipasar dunia. Pameo yang dikatakan oleh para *oiltrader* di Arab Saudi seperti yang disinggung di awal tulisan ini tentu akan terbukti analisisnya, bahwa apabila jumlah minyak impor 800 ribu bph yang dialokasikan untuk Indonesia dari beberapa negara produsen, distop pasti

menjadi ajang perebutan oleh negara negara yang haus akan minyak seperti Amerika, Cina, India dan Jepang, serta sederetan negara pengimpor minyak lainnya. Di satu sisi, bila memang ada skenario impor minyak dihentikan, maka sulit dilukiskan betapa dampak ekonomi yang akan terjadi di Indonesia. Satu hal yang pasti, akan terjadi kelumpuhan atau kolaps di berbagai sektor ekonomi di seluruh wilayah. Terlebih lagi bila stop impor itu dilakukan dalam jangka waktu 22 hari sesuai batas aman stok BBM, maka seluruh kegiatan ekonomi dan militer akan mengalami kelumpuhan sebesar 60% secara nasional. Bila ada yang mengatakan konsumsi BBM di Indonesia mengalami penurunan, hal itu tidak lain karena kebijakan pemerintah menghendaki penghematan energi dengan cara pemberhentian jam siaran radio dan televisi, sedangkan yang diperbolehkan hanya sampai jam 1 malam. Selain itu, para nelayan masih mengalami *shock* berat akibat kenaikan harga solar yang mencapai lebih dari 100%, disamping mereka tidak melaut karena sekarang sedang musim angin barat.

Tingginya harga minyak yang dibeli oleh pemerintah Indonesia dipasar internasional melahirkan beberapa fak-

tor signifikan terhadap makroekonomi Indonesia; Ditengah keprihatinan Indonesia sudah sebagai *net oil importer*, pada saat yang sama pemerintah juga memberikan subsidi. Akibat dari kebijakan ini nilai tukar mata uang rupiah melemah, terjadi defisit anggaran dan cepat atau lambat pasti bermuara pada cadangan devisa negara yang terkuras. Dapat diperhitungkan secara kasar, bahwa dengan harga minyak US \$ 60 / barel, berarti pemerintah memerlukan dana sekitar US\$48 juta / hari (800 ribu barel X US\$ 60/bbl) atau US \$1,5 miliar/bulan. Bagaimana kalau harga mencapai US\$70, US\$ 80, US\$90 atau US\$100 per barel? Di sisi lain, harga jual minyak Indonesia dipasar internasional dibawah US\$ 3 sampai US\$ 4 per barel. Memahami kondisi ini secara komprehensif, sungguh sangat ironis bahwa produksi minyak Indonesia yang seharusnya merupakan bagian dari kartel OPEC untuk menstabilkan atau menurunkan harga minyak dunia, ternyata malah menjadi bagian dari pemicu tingginya harga minyak.

PERLUNYA "OIL DIPLOMACY"

Guru besar hubungan internasional Hans J. Morgentau, mengatakan mi-

nyak selalu berkaitan dengan "*economic imperialisme*" atau sebagai salah satu unsur *national power* suatu bangsa. Bagi negara-negara yang tingkat impor minyaknya sangat tinggi (*net oil importer*), maka untuk mendapatkan akses ke sumber energi merupakan ajang kompetisi dan ini menciptakan suatu arena tatanan geopolitik baru di abad 21. Hal yang sama juga ditekankan oleh Michael T. Klare., May 9, 2005. dalam artikel yang berjudul : *Intensifying Global Struggle for Energy*, bahwa : *From Washington to New Delhi, Caracas to Moscow and Beijing, national leaders and corporate executives are stepping up their efforts to gain control over major sources of oil and natural gas as the global struggle for energy intensifies. Never has the competitive pursuit of untapped oil and gas reserves been so acute, and never has so much money as well as diplomatic and military muscle been deployed in the contest to win control over major foreign stockpiles of energy. To an unprecedented degree, a government's success or failure in these endeavors is being treated as headline news, and provoking public outcry when a rival power is seen as benefiting unfairly from a particu-*

lar transaction. With the officials of numerous governments coming under mounting pressure to satisfy the needs of their individual countries — at whatever cost — the battle for energy can only become more inflamed in the years ahead.

Di abad 21 sekarang, dimana negara-negara menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi Indonesia harus siap menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara lain baik dalam bidang produk/perdagangan (*product/trading*) maupun jasa-jasa (*services*). Dalam kaitan perdagangan minyak mentah ataupun BBM, Indonesia sudah harus menempatkan diri pada posisi sebagai *buyer* diantara negara negara *net oil importer* lainnya yang berada di kawasan benua Eropa, Asia Pasifik dan tidak ketinggalan Amerika. Jadi Indonesia harus bersaing ketat dengan negara negara yang mempunyai *pur-chasing power parity* sangat kuat.

Selanjutnya tantangan ekonomi Indonesia kedepan ialah berupaya untuk mendapatkan devisa sebanyak mungkin dan itu bisa diperoleh dari ekspor hasil pertambangan umum ke kawasan Asia Pasifik atau kawasan kontinen lainnya. Indonesia yang begitu kaya dengan sumber energi seperti gas

alam, batubara dan berbagai *raw material* mempunyai *competitive advantage* dan *comparative advantage* bila dibandingkan dengan negara-negara lain dikawasan regional. Terlebih lagi dalam hal jarak yang dekat dengan negara-negara *enduser* seperti Jepang, Cina, Korea Selatan dan Taiwan merupakan salah satu kekayaan strategis Indonesia yang tak ternilai harganya. Letak *proximities geography* terhadap negara-negara Asia Timur perlu kita ambil manfaatnya secara optimal. Maka untuk itu perlu dirancang *grand strategy* berikut implementasi operasionalnya yang berbasis sumber daya alam, termasuk terobosan menjual komoditi-komoditi tersebut secara langsung ke *enduser*, yakni negara-negara di Asia Timur. Sebagai salah satu prioritas Indonesia untuk menjalankan *foreign economy policy*, upaya ini merupakan pertimbangan devisa yang keluar untuk pembiayaan minyak impor (*oil bills*), karena dalam tahun tahun mendatang Indonesia memerlukan suplai energi sangat besar dari luar. Kebutuhan akan minyak impor ini tak mungkin ditanggulangi seperti halnya komoditi impor beras, jagung, kedelai dan gula yang notabene dapat disubstitusi untuk ditanam dibantaran tanah yang masih luas di tanah air dalam waktu

yang *relative* singkat. Salah satu jalan untuk mengatasi ini, Indonesia (meskipun sebagai anggota OPEC), harus mulai menerapkan atau melaksanakan *oil diplomacy* seperti negara-negara pengimpor minyak lainnya. Dalam buku Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa periode 1945 -1950, Departemen Luar Negeri, 2004, dijelaskan tentang bagaimana Indonesia melakukan tugas diplomasi perjuangan untuk meyakini dan memperoleh dukungan atas kemerdekaannya. Diplomasi perjuangan harus aktif berprakasa, kreatif dan *assertif*. Disebutkan juga ada 11 macam metode diplomasi, antara lain : *Open, Covert, Secret, Machiavellian, Preventive, Conference, Gunboat, Pingpong, Humanitarian Diplomacy, Pertemuan diplomatik dan terakhir Diplomasi Kebudayaan*. Esensi buku tersebut menjelaskan kegiatan diplomasi yang mencakup pengertian diplomasi perjuangan dimana diperkenankan menggunakan cara yang non konvensional namun tetap dalam tatakrama diplomasi internasional. Dapat disimpulkan, penggunaan diplomasi yang dibekali keteguhan pendirian dan prinsip pencapaian sasaran yang jelas. Dengan demikian maka *Oil Diplomacy* harus dapat diterjemahkan oleh para perwakilan Indonesia, terutama yang

bertugas di negara-negara penghasil minyak untuk bisa menjamin suplai minyaknya ke Indonesia.

Salah satu penerapan *Oil diplomacy* yang paling efektif dan strategis ialah mengajak negara-negara OPEC di Timur Tengah melakukan investasi di Indonesia, seperti Iran yang mulai melirik kawasan Asia Tenggara. Petrodollarnya sangat melimpah setelah harga minyak mencapai diatas US \$ 60 per barel. Juga, mengajak Arab Saudi untuk pertemuan khusus, supaya Indonesia tidak terlewatkan lagi dalam agenda perjalanan keliling Asia Tenggara berikutnya. Mungkin pihak Indonesia perlu mengadakan pertemuan khusus melalui pendekatan tingkat tinggi (G to G) dengan seluruh anggota OPEC di kawasan *Heartland* agar Indonesia dibantu jatah gas alamnya demi kelangsungan hidup pabrik pupuk kita. Sedangkan terhadap poros Asia Timur, Indonesia perlu mengupayakan *Oil diplomacy* untuk penjualan gas alam atau hasil aneka tambang. Misi *oil diplomacy* ke kawasan Asia Timur pernah dilakukan oleh presiden Megawati dengan berdansa. Hal itu dilakukan sebagai upaya pendekatan dengan Cina agar dapat memenangkan kontrak suplai gas alam jangka panjang ke Cina selama 22 tahun. Sangat di-

sayangkan pengorbanan ini tidak membuahkan hasil, karena Indonesia dikalahkan oleh negara " *Down Under* " yang jaraknya lebih jauh. Kejadian yang hampir sama terjadi ketika Qatar, bahkan dengan jarak tempuhnya yang lebih jauh (sekitar 3500 miles), bisa mengalahkan Indonesia untuk kontrak suplai gas alam jangka panjang ke Taiwan selama 20 tahun. Era ekonomi abad 21, diwarnai dengan tingkat ketergantungan atas kebutuhan primer antar negara sangat tinggi, terutama bidang energi. Bagi Indonesia yang kebijakan luar negerinya menganut paham bebas aktif, sudah saatnya memasuki babak baru dengan menerapkan metode *oil diplomacy* sebagai jawaban terhadap panggilan kepentingan nasional serta sekaligus untuk lebih mendorong Indonesia kedepan dalam konteks hubungan politik internasional. □

DAFTAR PUSTAKA

1. *Jurnal CSICI* No 4-7 2005
2. Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa ke Masa, Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia, 2004
3. *The Economics of War & Oil*, By George Kane, 2004
4. Rusia Oil www : *EIA Country Analysis Brief*, 2004
5. WWW : *CIS Intelligence Center- How Russia Pits One Friend Against Another*, 2003
6. *Powershift - Oil, Money, & War*, James J. Puplava, February 22, 2002
7. *Japan's Energy Strategy, Russian Economic Security, and Opportunities for Russian Energy Development: Major Issues and Policy Recommendations* by: Takamichi Mito Professor and Chief Coordinator Japan in Today's World Program Kyushu University, Fukuoka, 2002
8. *Japanese Energy Security and Changing Global Energy Markets: An Analysis of Northeast Asian Energy Cooperation and Japan's Evolving Leadership Role in the Region Prepared in conjunction with an energy study sponsored by The Center for International Political Economy and The James A. Baker III Institute for Public Policy Rice University* - May 2000
9. *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and The Creation of the Modern Middle East*, David Frownkin, Owl Books, 2001,
10. *The Coming Anarchy: Shattering The Dreams of The Post Cold War*, Robert D. Kaplan, Vintage Books, 2001

